



ETIKA PROFESI KEGURUAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KONTEMPORER: ANALISIS KUALITATIF BERBASIS STUDI PUSTAKA

ETHICS OF THE TEACHING PROFESSION FROM THE PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY EDUCATION: A QUALITATIVE ANALYSIS BASED ON LITERATURE STUDY

Muzain Faqih Zuhri¹, Reni kirani², Lulus Lusiana³, Heggy Zahy Ayyasy⁴, Asep Mulyana⁵

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: muzainfaqih274@gmail.com¹, kiranir@gmail.com², luluslusiana6@gmail.com³,
heggyzahyayasy@gmail.com⁴, asepmulyana@uinssc.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 05-12-2025

Revised : 07-12-2025

Accepted : 09-12-2025

Published : 11-12-2025

Abstract

This study is based on the increasingly complex ethical dilemmas faced by teachers in the modern era of education, which is characterized by digitalization, social change, and transforming professional expectations, creating a need for a systematic understanding of how professional ethics are internalized and applied in practice. The purpose of this study is to describe the theoretical basis of professional ethics in education, analyze its application in the context of contemporary learning, identify challenges, and develop a model for strengthening educator ethics that is responsive to technological advances and social change. This study applies a qualitative approach with a literature study using purposive sampling techniques on national and international scientific publications from 2019 to 2024, professional regulations, and teacher organization documents; the data were analyzed through content and thematic analysis with the help of NVivo software to map concepts, patterns of findings, and relationships between themes. The research findings show that the six ethical principles of integrity, responsibility, fairness, care, practical wisdom, and professionalism are the main foundations for ethical teacher practice, but their implementation is still hampered by a low understanding of ethics, structural pressures, a lack of continuing training, and weak accountability mechanisms, especially in dealing with digital issues such as data privacy, virtual interactions, and the use of artificial intelligence. The research shows that improving professional ethics requires a tiered model that includes case-based ethics education, strengthening the code of ethics at the school level, academic supervision that focuses on ethics, a collective reflective culture, and the integration of ethics in professional assessment. The main contribution of this research is a theoretical synthesis and operational model that can be used as a reference for policy development, teacher education curricula, and strategies for improving professionalism in the field.

Keywords: Professional Ethics, Teaching, Contemporary Education

Abstrak

Studi ini didasari oleh semakin rumitnya dilema etis yang dihadapi oleh guru di era pendidikan modern yang ditandai oleh digitalisasi, perubahan sosial, dan harapan profesional yang bertransformasi, sehingga ada kebutuhan akan pemahaman yang sistematis tentang cara etika profesi diinternalisasi dan diterapkan dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dasar teori etika profesi pendidikan, menganalisis penerapannya dalam konteks pembelajaran kontemporer, serta mengidentifikasi tantangan dan menyusun model penguatan etika pendidik yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka menggunakan teknik purposive



sampling pada publikasi ilmiah nasional dan internasional dari tahun 2019 hingga 2024, regulasi profesi, serta dokumen organisasi guru; data dianalisis melalui analisis isi dan tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk memetakan konsep, pola temuan, dan hubungan antartema. Temuan penelitian menunjukkan bahwa enam prinsip etis integritas, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, kebijaksanaan praktis, dan profesionalisme merupakan dasar utama bagi praktik etis guru, tetapi penerapannya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman etika, tekanan struktural, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas, terutama dalam menangani isu digital seperti privasi data, interaksi virtual, dan penggunaan kecerdasan buatan. Penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan etika profesi memerlukan model bertingkat yang mencakup pendidikan etika berbasis kasus, penguatan kode etik di tingkat sekolah, supervisi akademik yang fokus pada etika, budaya reflektif kolektif, dan pengintegrasian etika dalam penilaian profesional; kontribusi utama penelitian ini adalah sintesis teoritis serta model operasional yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kebijakan, kurikulum pendidikan guru, dan strategi peningkatan profesionalisme di lapangan.

Kata Kunci: Etika Profesi, Keguruan, Pendidikan kontemporer

PENDAHULUAN

Fenomena menurunnya kualitas etika profesi keguruan di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa etika tidak lagi dapat dipandang sebagai aturan pelengkap dalam pendidikan, tetapi harus ditempatkan sebagai fondasi utama bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Meningkatnya laporan pelanggaran disiplin, penyimpangan perilaku profesional, dan tanda-tanda melemahnya kualitas pengajaran terutama setelah masa pandemi COVID-19 mempertegas pentingnya pembahasan etika guru secara mendalam dan komprehensif dalam konteks pendidikan modern (Hasn et al., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa pembenahan etika guru merupakan kebutuhan sistemik yang mendesak dan tidak dapat ditunda.

Di tingkat global, perkembangan menuju Society 5.0 menghadirkan tantangan baru yang belum pernah dihadapi oleh generasi pendidik sebelumnya. Perubahan ini meliputi percepatan digitalisasi pembelajaran, meluasnya penggunaan platform komunikasi digital, hingga meningkatnya eksposur guru terhadap media sosial yang mengaburkan batas profesional dan personal. Selain itu, interaksi pedagogis yang beralih ke format virtual atau hybrid menciptakan dinamika moral dan profesional yang berbeda dari pembelajaran tatap muka tradisional. Transformasi ini memunculkan dilema etis baru terkait privasi digital, batasan profesional, serta integritas akademik dalam ruang belajar yang semakin bermediasi teknologi.

Dalam konteks Indonesia, etika profesi guru memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Kode Etik Guru Indonesia yang dikembangkan oleh PGRI. Regulasi ini menempatkan etika sebagai pilar utama bagi pembentukan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi guru. Namun, persoalan penting yang perlu ditinjau adalah efektivitas penerjemahan kerangka normatif tersebut ke dalam praktik sehari-hari, terutama ketika guru berhadapan dengan dinamika sosial dan teknologi yang berubah begitu cepat. Dengan demikian, tantangan etika guru tidak hanya bersifat individual, tetapi juga terkait dengan struktur kebijakan, kurikulum pendidikan guru, dan kultur organisasi sekolah.

Literatur akademik tentang etika keguruan telah berkembang, namun analisis kritis menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan penelitian. Banyak studi masih membatasi pembahasan etika pada kode normatif tanpa mengintegrasikan perkembangan digital yang mengubah praktik profesional, sebagaimana terlihat dalam penelitian Setiyaningsih (2020). Selain itu, sebagian besar



penelitian hanya bersifat deskriptif dengan cakupan konteks sempit sehingga sulit digeneralisasi, seperti studi Santoso dan Fitriatin (2024). Sementara itu, temuan internasional yang kaya, misalnya Minihan et al. (2022), belum sepenuhnya dikaitkan dengan konteks Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan struktural yang berbeda. Kesenjangan-kesenjangan ini menegaskan perlunya kajian sintetis yang lebih integratif dan relevan dengan konteks lokal.

Menanggapi berbagai kesenjangan tersebut, penelitian ini disusun untuk menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai konstruksi etika profesi guru serta implementasinya dalam konteks pendidikan kontemporer. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan literatur klasik dan kontemporer, menganalisis pengaruh digitalisasi serta perubahan sosial terhadap praktik etis, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sekolah serta guru. Pada saat yang sama, penelitian ini merumuskan model konseptual dan operasional yang dapat digunakan untuk memperkuat etika profesi guru secara adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah pemahaman teoretis tentang etika keguruan, tetapi juga menyediakan landasan praktis bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan profesionalisme guru di abad ke-21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) yang berorientasi pada analisis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah relevan mengenai etika profesi keguruan dalam konteks pendidikan kontemporer. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri, menyintesis, dan mengkonstruksi pemahaman teoretis serta praktik etika guru berdasarkan bukti empiris dan konseptual dari literatur terkini (Snyder, 2019). Penelitian dilakukan melalui proses analisis dokumen terhadap artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA, buku ilmiah, kebijakan pemerintah (UU Guru dan Dosen, Kode Etik PGRI), serta publikasi internasional seperti *Teaching and Teacher Education* dan *Journal of Moral Education*. Pendekatan ini relevan karena ruang lingkup kajian etika profesi keguruan bersifat multidimensional sehingga membutuhkan metode analitis yang komprehensif untuk memetakan isu, tren, serta model pendekatan yang berkembang dalam rentang 2019–2024.

Populasi penelitian mencakup seluruh publikasi ilmiah terkait etika profesi guru, profesionalisme pendidikan, etika digital, serta regulasi pendidikan yang terbit dalam periode 2019–2024. Pemilihan sampel menggunakan teknik non-probability sampling jenis purposive sampling, yaitu pemilihan sumber secara sengaja berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas publikasi, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian (Palinkas et al., 2019). Sumber data terdiri atas: (1) artikel internasional dari Scopus atau setara, seperti *Teaching and Teacher Education*, *Journal of Moral Education*, dan *International Journal of Educational Ethics*; (2) artikel nasional terindeks SINTA yang fokus pada profesionalisme dan etika guru; (3) buku metodologi dan teori etika; serta (4) regulasi pemerintah dan dokumen organisasi profesi seperti Kode Etik PGRI. Teknik ini dipilih karena penelitian pustaka menuntut seleksi ketat terhadap sumber yang paling relevan dan memenuhi standar akademik.

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur sistematis yang meliputi: identifikasi literatur, pencarian kata kunci (teacher ethics, professional ethics, digital pedagogy, moral professionalism), serta seleksi dokumen melalui database Google Scholar, Scopus Preview, DOAJ, SINTA, dan Portal Garuda. Setiap dokumen yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi: relevan dengan tema etika keguruan, terbit 2019–2024, tersaji dalam akses penuh, dan



berasal dari jurnal bereputasi. Selanjutnya dilakukan pencatatan bibliografis, ekstraksi data, serta pengodean tematik menggunakan coding sheet yang disusun berdasarkan teori etika profesi. Prosedur penelitian mengikuti tahapan runtut: (1) menentukan fokus dan tujuan penelitian, (2) mengidentifikasi literatur, (3) menyeleksi dokumen, (4) melakukan coding, (5) menginterpretasi data, dan (6) menyusun temuan serta model konseptual. Teknik ini sejalan dengan prosedur tinjauan pustaka sistematis sebagaimana disarankan Page et al. (2021) dalam PRISMA guidelines.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi kode, analisis pola tematik, komparasi literatur, serta penyimpulan hasil secara sistematis. Teknik analisis tematik Braun & Clarke (2021) digunakan untuk mengidentifikasi tema utama terkait konsep etika, implementasi, dilema profesional, dan strategi penguatan etika guru. Untuk membantu konsistensi analisis, digunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus sebagai alat pengodean, visualisasi hubungan tema, dan pemetaan komparatif antar-sumber. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu perbandingan temuan antar-jurnal internasional dan nasional, verifikasi teori dari buku rujukan, serta konfirmasi temuan dengan regulasi pemerintah. Pendekatan triangulasi ini memperkuat kredibilitas dan keandalan hasil penelitian, sebagaimana direkomendasikan dalam literatur metodologi kualitatif kontemporer (Carter et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Keguruan

Analisis sintesis literatur menunjukkan bahwa enam prinsip etis integritas, tanggung jawab profesional, keadilan, kepedulian (care), kebijaksanaan praktis (phronesis), dan profesionalisme muncul secara konsisten dalam publikasi ilmiah periode 2019–2024. Prinsip-prinsip ini tidak hanya dikemukakan dalam dokumen normatif seperti kode etik dan regulasi, tetapi juga teridentifikasi dalam studi empiris yang menelaah praktik keseharian guru di lapangan (Setiyaningsih, 2020; Lilja, 2023). Konsistensi kemunculan prinsip-prinsip tersebut mencerminkan bahwa etika keguruan tidak lagi dipahami sebagai seperangkat aturan formal semata, melainkan sebagai fondasi nilai yang mengarahkan pengambilan keputusan profesional dalam konteks pendidikan yang semakin kompleks.

Secara teoretis, temuan-temuan tersebut menegaskan terjadinya pertemuan dua tradisi besar dalam kajian etika profesi guru. Pertama, tradisi profesionalisme yang menonjolkan kompetensi, otonomi, serta akuntabilitas sebagai kriteria utama kualitas tenaga pendidik. Kedua, tradisi etika aplikatif atau virtue ethics yang menempatkan kebijaksanaan, kepekaan moral, dan pembentukan karakter sebagai inti tindakan etis. Dalam kerangka ini, etika profesi guru dipandang bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai kapasitas moral yang terwujud melalui sikap reflektif, pemahaman kontekstual, dan kemampuan adaptif dalam menghadapi situasi dilematis yang melekat pada pekerjaan mengajar.

Temuan tersebut juga memberikan dukungan empirik terhadap usulan kerangka integratif yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan (Lilja, 2023). Kerangka tersebut menggarisbawahi perlunya menyatukan kompetensi teknis dengan kebajikan praktis agar guru mampu bertindak secara etis dalam situasi yang dinamis. Dalam perspektif ini, profesionalisme tidak lagi dilihat sebagai kumpulan standar formal yang kaku, tetapi sebagai proses



pengembangan diri yang terus-menerus, di mana guru belajar menggabungkan aturan, pengalaman, serta intuisi moral dalam menyelesaikan persoalan etis yang beragam.

Bukti-bukti tambahan dari literatur memperkuat kesimpulan tersebut. Setyaningsih (2020) misalnya menekankan pentingnya pembentukan karakter calon guru melalui penguatan integritas dan tanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan profesi. Sementara itu, Lilja (2023) menegaskan perlunya menanamkan perspektif etika reflektif dan kebijaksanaan praktis dalam kurikulum pendidikan etika. Di sisi lain, Minihan et al. (2022) menunjukkan bagaimana tekanan akibat pandemi menguji ketahanan moral serta kemampuan reflektif guru dalam situasi nyata, sehingga prinsip-prinsip etis tersebut tampak semakin relevan dan mendesak. Bersama-sama, bukti ini menegaskan urgensi menjadikan etika profesi sebagai kompetensi multidimensional yang tertanam secara utuh dalam pendidikan dan praktik keguruan.

Prinsip etika	Manifestasi praktis di sekolah	Sumber (pilihan)
Integritas	Kejujuran akademik, transparansi penilaian	Setyaningsih, 2020
Tanggung jawab	Akuntabilitas profesional, kepatuhan pada standar	UU No.14/2005; Santoso & Fitriatin, 2024
Keadilan	Perlakuan adil terhadap siswa heterogen	Lilja, 2023
Kepedulian (care)	Perhatian pada kesejahteraan siswa	Minihan et al., 2022
Kebijaksanaan praktis	Pertimbangan kontekstual, pengambilan keputusan etis	Lilja, 2023
Profesionalisme	Kompetensi, ikut serta dalam pengembangan profesional	Setyaningsih, 2020

Tabel 1. Prinsip Etika & Bukti Literatur (ringkasan)

2. Implementasi Etika Profesi Guru

Sintesis menunjukkan bahwa implementasi etika terwujud pada praktik pembelajaran, penilaian, interaksi interpersonal guru, siswa dan kolaborasi profesional; namun implementasi ini tidak homogen: beberapa sekolah berhasil menginternalisasi nilai etis melalui budaya sekolah dan supervisi, sementara yang lain mengalami gap besar antara kode etik formal dan praktik sehari-hari (Santoso & Fitriatin, 2024). Tantangan kontemporer yang menonjol terkait era digital/Society 5.0 meliputi: (1) privasi data siswa (pengelolaan data pada platform pembelajaran), (2) perilaku di media sosial (blurred boundaries antara personal dan profesional), dan (3) penyalahgunaan AI dalam pembuatan tugas/penilaian baik oleh guru maupun siswa (temuan ini konsisten di berbagai kajian pasca-2019). Minihan et al. (2022) menyoroti bahwa beban kerja dan stres berkaitan langsung dengan menurunnya kapasitas reflektif untuk bertindak etis di kondisi krisis.

Analisis teoritis masalah implementasi dapat dijelaskan melalui teori organisasi profesi (Freidson) yaitu bahwa keberhasilan internalisasi etika bergantung pada mekanisme sosialisasi profesional, struktur insentif, dan kontrol internal serta melalui lensa etika terapan yang menuntut latihan deliberatif (case-based reflection) untuk mengasah kebijaksanaan praktis. selain itu analisis mendalam terhadap implementasi etika profesi guru yang ditemukan melalui



sintesis berbagai studi dalam penelitian ini mengungkapkan pola-pola yang menunjukkan kesesuaian dan resonansi yang kuat dengan tiga landasan normatif utama yang telah lama menjadi pilar dalam literatur etika filosofis dan etika profesional, yaitu pendekatan deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Ketiga kerangka teoretis ini, meskipun berbeda dalam penekanan dan logika justifikasinya, semuanya memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana guru memahami, menginternalisasi, dan mengoperasionalkan standar etika dalam praktik profesional mereka sehari-hari, terutama dalam menghadapi kompleksitas baru yang muncul dari digitalisasi dan integrasi teknologi artificial intelligence dalam pendidikan.

a. Pendekatan deontologi

Pendekatan deontologi yang berasal dari tradisi filosofis Kantian dan menekankan pentingnya kewajiban moral, aturan, dan prinsip sebagai basis justifikasi etis menemukan manifestasinya yang jelas dalam implementasi etika profesi guru melalui keberadaan dan fungsi pedoman kode etik formal serta regulasi profesional yang memberikan kerangka normatif tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh guru dalam praktik profesional mereka. Dalam perspektif deontologis, tindakan dianggap etis bukan terutama karena konsekuensinya yang baik, melainkan karena tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban atau prinsip moral yang berlaku universal.

Temuan-temuan empiris dari berbagai studi menunjukkan bahwa keberadaan pedoman kode etik dan regulasi formal memang berfungsi memberikan kewajiban-kewajiban spesifik yang harus dipenuhi oleh guru dalam berbagai aspek praktik profesional mereka. Sebagai ilustrasi konkret, kewajiban untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data siswa yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika profesi guru diartikulasikan secara eksplisit dalam berbagai kode etik profesional dan regulasi perlindungan data. Namun, studi-studi terbaru mengungkapkan bahwa efektivitas pedoman deontologis ini sangat bergantung pada karakteristik pedoman itu sendiri, khususnya tingkat kejelasan dan spesifisitasnya dalam memberikan panduan operasional.

Pola yang konsisten muncul dari berbagai konteks penelitian menunjukkan bahwa ketika pedoman etis bersifat jelas, spesifik, dan tidak ambigu dalam mengartikulasikan kewajiban guru serta menyediakan contoh-contoh konkret tentang bagaimana prinsip harus diterapkan dalam situasi spesifik, tingkat kepatuhan guru terhadap standar etika cenderung meningkat secara signifikan. Sebaliknya, ketika pedoman bersifat abstrak, ambigu, atau tidak memberikan panduan yang cukup spesifik untuk menangani situasi-situasi baru yang muncul terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dan platform pembelajaran berbasis artificial intelligence maka praktik guru menjadi sangat beragam dan inkonsisten, dengan beberapa guru mengadopsi interpretasi yang sangat konservatif sementara yang lain mengambil pendekatan yang jauh lebih permisif (Soliha, 2024, n.p.).

Implikasi praktis dari temuan ini sangat penting untuk pengembangan kebijakan: regulasi dan kode etik yang bersifat konkret dalam artian menyediakan panduan spesifik tentang situasi-situasi tertentu, termasuk dilema-dilema digital kontemporer dan yang disosialisasikan secara efektif melalui program pelatihan dan pengembangan profesional yang sistematis, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan konsistensi dan kualitas implementasi



etika di kalangan guru. Ini menunjukkan bahwa pendekatan deontologis dalam etika profesi guru tidak cukup hanya dengan merumuskan prinsip-prinsip abstrak, tetapi memerlukan artikulasi yang lebih operasional dan kontekstual, serta mekanisme sosialisasi yang memastikan bahwa guru memahami tidak hanya apa yang menjadi kewajiban mereka tetapi juga bagaimana kewajiban tersebut harus diterapkan dalam berbagai situasi konkret yang mereka hadapi.

b. Pendekatan utilitarianisme

Pendekatan utilitarianisme yang berakar pada karya filosofis Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dan menekankan bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi terbaik atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak juga memainkan peran signifikan, meskipun seringkali implisit, dalam cara guru mengambil keputusan etis dalam praktik profesional mereka, terutama ketika menghadapi situasi-situasi yang melibatkan trade-off antara berbagai nilai atau kepentingan yang sama-sama penting.

Studi-studi yang mengeksplorasi penggunaan teknologi pendidikan oleh guru mengungkapkan bahwa keputusan guru misalnya keputusan tentang apakah akan menggunakan platform teknologi pendidikan tertentu yang memiliki fitur pembelajaran canggih tetapi juga memproses dan menyimpan data siswa dalam jumlah besar dengan potensi risiko privasi seringkali melibatkan penilaian yang bersifat konsekuensial, di mana guru mencoba untuk menimbang dan menyeimbangkan antara manfaat pembelajaran yang potensial (seperti personalisasi pengalaman belajar, peningkatan engagement siswa, atau efisiensi dalam memberikan umpan balik) versus risiko terkait privasi data, keamanan informasi, atau potensi bias algoritmik yang mungkin merugikan siswa tertentu.

Temuan yang menarik dan sekaligus mengkhawatirkan dari berbagai studi menunjukkan bahwa dalam situasi-situasi di mana terdapat tekanan untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas pembelajaran tekanan yang semakin intensif dalam konteks pasca-pandemi dan era akuntabilitas pendidikan guru kadang-kadang memilih untuk memprioritaskan efisiensi dan manfaat pembelajaran jangka pendek meskipun ada risiko etis yang telah diidentifikasi, seperti risiko terhadap privasi siswa atau potensi untuk menggunakan platform yang tidak sepenuhnya transparent tentang bagaimana data siswa digunakan. Pola ini menandakan bahwa banyak guru, meskipun mungkin memiliki kesadaran tentang risiko etis, tidak selalu memiliki kerangka kerja atau prosedur yang terstruktur untuk melakukan penilaian konsekuensial yang sistematis dan komprehensif, yang memperhitungkan tidak hanya manfaat jangka pendek tetapi juga risiko jangka panjang dan distribusi dampak yang mungkin tidak merata di antara siswa (Akgün, 2021, n.p.).

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa pendidikan etika untuk guru perlu secara eksplisit mengajarkan dan melatih keterampilan penilaian konsekuensial yang terstruktur termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi stakeholder yang berbeda yang mungkin terpengaruh oleh keputusan, mengantisipasi konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang, menimbang trade-off antara berbagai nilai yang mungkin berkonflik, dan mempertimbangkan distribusi manfaat dan risiko di antara siswa yang mungkin memiliki kerentanan berbeda. Tanpa kapasitas analisis konsekuensial yang canggih ini, pendekatan utilitarianis dalam praktik guru berisiko menjadi simplistic atau bias terhadap pertimbangan efisiensi jangka



pendek dengan mengorbankan perlindungan nilai-nilai fundamental seperti privasi, kesetaraan, atau otonomi siswa.

c. Pendekatan etika kebajikan

Pendekatan etika kebajikan yang memiliki akar dalam tradisi Aristotelian dan berfokus bukan terutama pada aturan atau konsekuensi, tetapi pada karakter moral agen mengalihkan perhatian dari pertanyaan "Apa yang harus saya lakukan?" ke pertanyaan yang lebih fundamental: "Orang seperti apa yang saya harus menjadi?" atau "Kebajikan apa yang harus saya kembangkan?" Dalam konteks profesi guru, etika kebajikan menekankan pentingnya mengembangkan disposisi moral atau karakter yang memungkinkan guru untuk secara konsisten dan spontan bertindak secara etis, bahkan dalam situasi-situasi yang ambigu atau di mana tidak ada pengawasan eksternal.

Temuan dari berbagai studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi karakter moral guru memang memainkan peran yang sangat signifikan dan seringkali menentukan dalam kualitas praktik etis, baik dalam konteks interaksi dengan siswa di ruang kelas maupun dalam kolaborasi profesional dengan sesama guru dan pemangku kepentingan lain. Secara spesifik, sejumlah kebajikan atau karakter moral muncul berulang kali dalam berbagai studi sebagai faktor penentu atau prediktor penting dari praktik etis yang berkualitas tinggi.

Integritas dipahami sebagai konsistensi antara nilai-nilai yang dideklarasikan dan tindakan aktual, serta keberanian untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral bahkan ketika ada tekanan untuk berkompromi muncul sebagai kebajikan fundamental yang memungkinkan guru untuk menolak tekanan untuk mengambil jalan pintas etis atau untuk mempertahankan standar profesional bahkan ketika hal itu tidak nyaman atau tidak populer. Kehati-hatian (prudence atau practical wisdom) dipahami sebagai kapasitas untuk membuat pertimbangan yang bijaksana dalam situasi-situasi kompleks dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan terbukti sangat penting dalam konteks digital di mana guru harus menavigasi dilema-dilema baru yang tidak memiliki preseden jelas. Tanggung jawab pribadi dipahami sebagai kesediaan untuk mengakui dan memikul tanggung jawab atas tindakan dan dampaknya, daripada mengalihkan tanggung jawab kepada faktor eksternal muncul sebagai karakter yang membedakan antara guru yang hanya sekadar mematuhi aturan minimal dan guru yang secara proaktif berusaha untuk bertindak dalam kepentingan terbaik siswa.

Yang sangat penting untuk dicatat adalah bahwa studi-studi menunjukkan bahwa pendidikan etika yang secara eksplisit menekankan pembentukan karakter moral dari pada hanya fokus pada transmisi pengetahuan tentang kode etik atau aturan terbukti lebih efektif dalam memperkuat praktik etis yang berkelanjutan dan resilient terhadap berbagai tekanan dan tantangan (Adams, 2022, n.p.). Ini konsisten dengan argumen teoretis dalam etika kebajikan bahwa karakter moral yang telah terinternalisasi memberikan panduan yang lebih robust dan adaptif daripada sekadar pengetahuan tentang aturan, karena karakter memungkinkan respons etis yang cepat dan tepat bahkan dalam situasi-situasi baru yang tidak tercakup oleh aturan yang ada.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa program pendidikan guru dan pengembangan profesional perlu mengintegrasikan pendekatan yang tidak hanya



mengajarkan tentang prinsip-prinsip etika atau kode etik, tetapi secara aktif berusaha untuk membentuk karakter moral melalui pedagogi yang tepat seperti pembimbingan reflektif, modeling oleh mentor yang memiliki karakter kuat, pengalaman praktik yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan kebajikan melalui latihan berulang, dan komunitas praktik yang mendukung pengembangan identitas profesional yang berorientasi pada nilai-nilai etis.

Perbandingan kritis antara literatur etika keguruan yang dipublikasikan dalam era pra-artificial intelligence khususnya studi-studi yang dilakukan sebelum tahun 2015 ketika integrasi teknologi digital dalam pendidikan masih relatif terbatas dengan penelitian-penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam periode 2020-2024 mengungkapkan pergeseran fokus yang sangat signifikan yang mencerminkan transformasi fundamental dalam lanskap praktik profesional guru.

Studi-studi awal dalam literatur etika keguruan, yang dikembangkan dalam konteks pendidikan yang didominasi oleh interaksi tatap muka langsung antara guru dan siswa, cenderung menekankan dimensi-dimensi etis yang terkait dengan relasi interpersonal tradisional dalam ruang kelas fisik. Fokus utama studi-studi ini mencakup isu-isu seperti: keadilan dalam perlakuan terhadap siswa dalam setting kelas tradisional, pemeliharaan batas-batas profesional yang tepat dalam interaksi langsung, penanganan konflik dalam konteks tatap muka, serta kewajiban untuk memperlakukan semua siswa dengan hormat dan adil. Kode etik yang dikembangkan dalam periode ini secara alami mencerminkan konteks praktik yang ada pada waktu itu, dengan pedoman yang berfokus terutama pada situasi-situasi yang terjadi dalam ruang fisik sekolah dan melibatkan interaksi langsung.

Namun, penelitian-penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran fokus yang dramatis, dengan penekanan yang semakin kuat pada dimensi digital dari praktik etis guru yang mencakup spektrum isu yang jauh lebih luas dan kompleks. Dimensi-dimensi baru ini mencakup: etika dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data siswa melalui berbagai platform pembelajaran digital; pertimbangan etis terkait penggunaan algoritma untuk personalisasi pembelajaran atau penilaian otomatis, termasuk risiko bias algoritmik yang dapat merugikan kelompok siswa tertentu; dilema terkait privasi dan pengawasan dalam lingkungan pembelajaran digital di mana aktivitas siswa dapat dipantau dan direkam secara ekstensif; serta tantangan dalam memelihara hubungan pedagogis yang autentik dan suportif dalam konteks interaksi yang dimediasi oleh teknologi.

Lebih spesifik lagi, penelitian terbaru telah mengidentifikasi sejumlah isu etis baru yang tidak memiliki analog jelas dalam praktik tradisional, seperti: penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk monitoring kehadiran atau engagement siswa; implementasi sistem prediktif yang menggunakan data historis siswa untuk memprediksi kinerja atau risiko dropout masa depan, dengan risiko menciptakan self-fulfilling prophecies; penggunaan chatbot berbasis artificial intelligence untuk interaksi dengan siswa, yang menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan potensi untuk menggantikan interaksi manusiawi; serta tantangan yang muncul dari konten yang dihasilkan oleh artificial intelligence, termasuk



risiko deepfake dan konten manipulatif yang dapat membahayakan reputasi atau kesejahteraan siswa.

Perubahan fokus yang fundamental ini telah menghasilkan ketidaksesuaian atau misalignment yang signifikan antara kode etik tradisional yang dikembangkan untuk konteks praktik pra-digital dengan realitas praktik guru kontemporer yang sangat dimediasi oleh teknologi digital dan artificial intelligence. Kode etik lama, meskipun masih relevan dalam prinsip-prinsip fundamental yang mereka artikulasikan, seringkali tidak memberikan panduan yang cukup spesifik atau konkret untuk membantu guru menavigasi dilema-dilema etis baru yang muncul dari penggunaan teknologi.

Sebagai respons terhadap ketidaksesuaian ini, studi-studi teranyar secara konsisten dan tegas merekomendasikan perlunya revisi substansial terhadap kode etik guru yang ada untuk memasukkan secara eksplisit aspek-aspek digital dan consideration terkait artificial intelligence. Rekomendasi spesifik mencakup: penambahan prinsip-prinsip terkait tanggung jawab guru dalam melindungi privasi data siswa dalam lingkungan digital; pedoman tentang evaluasi kritis terhadap teknologi pendidikan sebelum implementasi, termasuk assessment tentang bias potensial, transparansi algoritma, dan keamanan data; kewajiban untuk memahami dan dapat menjelaskan kepada siswa dan orang tua tentang bagaimana teknologi yang digunakan bekerja dan bagaimana data siswa digunakan; serta panduan tentang bagaimana memelihara dimensi relasional dan humanistik dalam pengajaran meskipun menggunakan teknologi yang dapat mengotomatisasi berbagai aspek interaksi pedagogis (Tan, 2024; Soliha, 2024).

Lebih jauh, beberapa studi terbaru juga merekomendasikan bahwa revisi kode etik tidak hanya harus bersifat additive menambahkan isu-isu baru tetapi juga harus reconceptualize beberapa prinsip fundamental dengan cara yang mencerminkan realitas digital. Misalnya, konsep "privasi siswa" perlu diperluas dari sekadar menjaga kerahasiaan informasi personal dalam percakapan atau dokumen fisik, menjadi mencakup perlindungan data digital, hak siswa atas data mereka sendiri, dan transparansi tentang bagaimana data digunakan. Demikian pula, konsep "perlakuan yang adil" perlu diperluas untuk mencakup pertimbangan tentang akses yang setara terhadap teknologi dan kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan sistem algoritmik tidak memperbesar ketidaksetaraan yang sudah ada.

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa evolusi fokus etika keguruan ini bukan berarti bahwa isu-isu etis tradisional yang terkait dengan interaksi tatap muka menjadi tidak relevan. Sebaliknya, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan perhatian terhadap dimensi digital baru dengan pemeliharaan nilai-nilai fundamental yang telah lama menjadi inti dari etika profesi guru seperti menghormati martabat setiap siswa, bertindak dalam kepentingan terbaik siswa, dan memelihara kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada profesi guru. Sintesis antara nilai-nilai abadi ini dengan sensitivitas terhadap tantangan kontekstual baru merupakan agenda kritis untuk pengembangan etika profesi keguruan di masa depan.

3. Faktor Penghambat Etika Profesi Guru

Analisis tematik terhadap berbagai sumber literatur mengungkap bahwa hambatan terhadap penguatan etika profesi guru dapat dipetakan ke dalam empat kategori utama yang



saling berkaitan. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan etika dalam dunia pendidikan bukan sekadar isu individu, melainkan akumulasi dari faktor kognitif, struktural, institusional, dan pedagogis. Dengan menelaah penelitian terkini, terlihat bahwa tantangan yang muncul tidak hanya berhubungan dengan kurangnya pemahaman mengenai norma etis, tetapi juga terkait dengan lingkungan kerja yang kurang mendukung praktik etis secara konsisten.

Kategori pertama menyangkut rendahnya literasi etika. Banyak guru, terutama pada tahap awal karier, memiliki pemahaman normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan, tetapi belum memiliki keterampilan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan nyata. Studi di lingkungan SINTA menunjukkan bahwa modul pembelajaran yang menekankan praktik etis berbasis kasus masih jarang ditemukan, sehingga guru tidak mendapatkan cukup ruang untuk mengembangkan kompetensi etis melalui simulasi atau refleksi terhadap situasi dilematis (Setiyaningsih, 2020). Kondisi ini memperlemah kemampuan guru untuk menavigasi persoalan moral yang muncul dalam interaksi sehari-hari dengan peserta didik.

Kategori kedua berkaitan dengan tekanan struktural yang secara langsung memengaruhi kapasitas reflektif guru. Beban administrasi yang semakin berat, tuntutan pengisian laporan digital, serta target kinerja yang ketat membuat guru lebih sering mengambil tindakan reaktif daripada mempertimbangkan opsi terbaik secara etis. Minihan et al. (2022) menunjukkan bagaimana tekanan serupa pada masa pandemi memperburuk keterbatasan kapasitas reflektif tersebut, sehingga aspek etis kerap tersisih oleh kebutuhan untuk merespons cepat kondisi darurat atau tuntutan institusi. Hal ini memperlihatkan bahwa integritas dan profesionalisme tidak akan optimal jika tidak ditopang oleh kondisi kerja yang memungkinkan guru berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan pertimbangan moral yang matang.

Kategori ketiga adalah minimnya pelatihan berkelanjutan yang secara komprehensif mengintegrasikan etika ke dalam praktik lapangan. Program seperti PPG atau PLP sering kali hanya menghadirkan etika sebagai mata kuliah atau materi terpisah, bukan sebagai kompetensi yang ditanamkan melalui pengalaman praktik, supervisi, dan refleksi kritis. Berdasarkan analisis dokumen kurikulum, tampak bahwa kurangnya integrasi ini membuat transfer pembelajaran etika ke dunia nyata menjadi lemah. Guru mungkin memahami konsep etika secara teoretis, tetapi tidak memiliki dukungan yang memadai untuk menerapkannya ketika berhadapan dengan situasi kompleks di sekolah.

Kategori keempat mencakup aspek pengawasan dan akuntabilitas yang belum optimal. Meskipun lembaga profesi telah menetapkan kode etik guru, mekanisme implementasi, penegakan, dan pengaduan sering kali tidak berjalan konsisten di berbagai daerah atau tingkat satuan pendidikan. Santoso & Fitriatin (2024) menyoroti bahwa dalam beberapa konteks, kepatuhan terhadap kode etik lebih bersifat simbolis daripada operasional, sehingga tidak memberikan efek pembinaan maupun pencegahan yang memadai. Ketidakjelasan mekanisme akuntabilitas ini melemahkan fungsi regulatif kode etik yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam menjaga standar etika profesi.

Secara keseluruhan, keempat kategori hambatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan etika profesi guru membutuhkan pendekatan yang sistemik dan berlapis. Tidak cukup hanya memperbaiki pemahaman individu, tetapi juga perlu menyediakan lingkungan kerja yang manusiawi, kurikulum yang integratif, dukungan pelatihan yang berkelanjutan, serta sistem



akuntabilitas yang tegas dan konsisten. Tanpa intervensi yang holistik, etika profesi guru berisiko tetap berada pada level deklaratif tanpa terwujud secara nyata dalam praktik pendidikan.

Faktor penghambat	Dampak praktis	Implikasi untuk intervensi
Literasi etika rendah	Keputusan etis lemah; kesalahan penilaian	Pengembangan modul case-based
Tekanan struktural	Keputusan reaktif, burnout	Pengurangan beban administratif
Minim pelatihan	Transfer teori ke praktik rendah	Pelatihan berkelanjutan + mentoring
Pengawasan lemah	Kepatuhan simbolis	Mekanisme akuntabilitas & restorative

Tabel 2. Faktor Penghambat & Implikasi Praktis

4. Model Penguatan Etika Profesi

Dari sintesis bukti muncul model penguatan etika yang berlapis (multi-tier) dan adaptif. Komponen inti model meliputi: (a) pendidikan etika berbasis kasus (case-based learning) pada PPG, PLP, dan program in-service menekankan simulasi dilema, diskusi reflektif, dan penulisan refleksi etis; (b) penguatan kode etik berbasis sekolah adaptasi kode nasional ke konteks sekolah dengan SOP praktis; (c) supervisi akademik berorientasi etika pengawas melakukan coaching etis, bukan sekadar audit teknis; (d) budaya refleksi guru komunitas praktik yang memfasilitasi dialog rutin tentang dilema etis; dan (e) integrasi etika dalam penilaian kinerja profesional (menilai aspek etis selain kompetensi pedagogis). Model ini berakar pada teori kompetensi profesional dan etika kebajikan: pengembangan kebijaksanaan praktis melalui praktik reflektif akan meningkatkan penerapan prinsip etika di situasi konkret (Lilja, 2023).

Bukti efektivitas model (dari literatur): studi-studi kecil menunjukkan bahwa intervensi berbasis kasus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etis pada guru (studi eksperimental terpilih; ringkasan dalam literatur 2019–2023). Namun, bukti kuantitatif besar-skala masih terbatas menunjukkan kebutuhan studi evaluatif lebih lanjut. Selain itu penguatan profesionalitas guru termasuk etika profesi dapat dicapai melalui penerapan Professional Learning Community (PLC) di sekolah. PLC diposisikan sebagai pendekatan yang menumbuhkan budaya belajar kolektif, reflektif, dan kolaboratif sehingga mendorong guru untuk berperilaku lebih etis, bertanggung jawab, dan profesional. Terdapat beberapa model pendekatan yang mendasari penguatan tersebut.

Pertama, pendekatan kepemimpinan kolaboratif memegang peran penting dalam membangun etika profesi guru. Artikel menegaskan bahwa kepemimpinan yang diperlukan bukanlah kepemimpinan hierarkis, melainkan kepemimpinan berbasis keahlian (expertise) dan kolegialitas. Kepala sekolah bertindak sebagai fasilitator, bukan pengendali. Kepemimpinan seperti ini menumbuhkan suasana saling percaya, penghargaan, dan dukungan terhadap perkembangan profesional guru. Lingkungan kepemimpinan yang menghormati kompetensi guru akan mendorong perilaku etis, seperti kejujuran profesional, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugas.



Kedua, pendekatan berbasis penciptaan iklim sekolah yang reflektif, terbuka, dan saling menghargai sangat menentukan keberlanjutan etika profesi. Didalam artikel lainnya menunjukkan bahwa iklim sekolah yang mendukung PLC memiliki karakter seperti hubungan yang saling percaya (*trusting relationship*) , budaya saling menghargai, kolaborasi, serta kesediaan mengakui kekurangan diri. Iklim seperti ini mendorong guru untuk berperilaku etis karena mereka merasa dihargai, aman, dan bebas mengekspresikan ide maupun refleksi tanpa takut disalahkan. Nilai-nilai moral seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab tumbuh dari budaya kerja seperti ini.

Ketiga, pendekatan sistem pendukung (*supporting system*) juga menjadi dasar penguatan etika profesi guru. Artikel menjelaskan bahwa dukungan berupa ketersediaan waktu, ruang belajar profesional, fasilitas yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten sangat penting dalam memastikan guru mampu menjalankan pembelajaran profesional secara konsisten. Ketika guru memiliki dukungan struktural yang baik, mereka dapat bekerja secara etis tanpa terganggu oleh tekanan administratif atau hambatan teknis yang sering kali memicu tindakan-tindakan tidak profesional.

Keempat, artikel menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi untuk membangun etika profesi berkelanjutan. Guru didorong bukan hanya mengikuti pelatihan formal, tetapi juga mengolah pengalaman mereka melalui refleksi kolaboratif. Proses refleksi membuat guru lebih sadar terhadap dampak praktik pembelajaran, mampu mengidentifikasi perilaku yang tidak etis, dan termotivasi untuk memperbaikinya. Refleksi bersama juga memperkuat budaya keterbukaan dan tanggung jawab moral terhadap perkembangan siswa.

Adapun tiga model pendekatan dalam pengembangan profesi guru melalui PLC yang secara langsung terkait dengan penguatan etika. Model pertama adalah pergeseran dari pendekatan direktif ke kolaboratif, yang menempatkan guru sebagai subjek aktif pengembangan profesional. Pergeseran ini meningkatkan rasa tanggung jawab moral guru karena mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Model kedua adalah pergeseran dari pendekatan struktural ke simbolik, yang menekankan nilai dan makna dalam profesionalitas, sehingga guru terdorong untuk mengembangkan komitmen etis yang berasal dari kesadaran diri, bukan kewajiban administratif. Model ketiga adalah pergeseran dari kelompok formal ke kelompok informal, di mana komunitas belajar tumbuh secara spontan dan sukarela. Interaksi informal antarguru menumbuhkan solidaritas, kejujuran, dan saling dukung nilai inti dari etika profesi guru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas dilema etis dalam profesi pendidikan di era modern menegaskan pentingnya penguatan etika guru sebagai dasar integritas profesional dan mutu layanan pendidikan. Penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika profesi, menganalisis penerapannya dalam konteks transformasi sosial-digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi dan merumuskan strategi penguatan etika yang relevan dan dapat diterapkan. Melalui pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi pustaka, data dikumpulkan dari publikasi ilmiah nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, dokumen normatif, serta pedoman profesi, lalu dianalisis secara tematik untuk menggambarkan pola temuan dan hubungan antar konsep. Temuan riset menunjukkan bahwa integritas, tanggung jawab,



keadilan, kepedulian, kebijaksanaan praktis, dan profesionalisme menjadi prinsip etika utama yang secara teoritis diakui, tetapi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal karena rendahnya pemahaman etika, lemahnya regulasi operasional, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta tantangan baru mengenai etika digital, privasi data, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, studi ini menekankan bahwa penguatan etika guru memerlukan pendekatan sistemik melalui pendidikan etika berbasis kasus, penguatan kode etik di tingkat sekolah, supervisi yang berfokus pada etika, serta pengembangan budaya reflektif; kontribusi teoritisnya terletak pada peta komprehensif mengenai prinsip dan tantangan etika profesi, sedangkan kontribusi praktisnya menawarkan model penguatan etika yang dapat diterapkan pada pendidikan guru, kebijakan institusional, dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas praktik pengajaran dan responsivitas terhadap perubahan dalam pendidikan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (2022). Artificial Intelligence and Teachers' New Ethical Obligations. [Paper].
- Akgün, S. (2021). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges. [Artikel tinjauan]. npj Science of Learning / open access review (akses melalui PubMed Central).
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Thematic analysis: A practical guide. SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/thematic-analysis/book248481>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. (2019). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>.
- Catasús, M. G. (2025). Centring the Ethical Implications Around Teacher and Learning Analytics. *Journal of Learning Analytics*.
- Hasn, F. A., Azizah, S. N., & Anisa, N. A. (2023). Urgensi etika profesi dalam menjaga martabat pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/3189>.
- Herawati, A. A. (2024). Exploring the Role of Artificial Intelligence in Education: Ethical stewardship. *Jurnal Alishlah* (2024).
- Lilja, A. (2023). Important perspectives and concepts to teach in ethics education. *Social Sciences*, 12(10), 582. <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/10/582>.
- Marín, V. I. (2021). Pre-service teachers' perceptions of social media data privacy. *British Journal of Educational Technology*.
- Minihan, E., et al. (2022). COVID-19 related occupational stress in teachers: A qualitative study. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9230802/>.
- Nurhamidah, N., Arma, D. J., Adawiyah, R., & Hidayatullah, R. (2025). Analisis kode etik guru dalam menjalankan profesi dan problematikanya di era Society 5.0. *Pendididas: Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>.



- Palinkas, L. A., et al. (2019). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>.
- Permana, J., & Sudarsyah, A. (2016). Model Pengembangan Profesi Guru melalui Professional Learning Community di Sekolah Menengah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(1), 81-90.
- Santoso, R. A., & Fitriatin, N. (2024). Penerapan kode etik profesi terhadap profesionalisme guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di era digital 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 4(4), 1364–1370. <https://jurnal.bimaberilmu.com/index.php/jppi/article/view/762>.
- Setiyaningsih, D. (2020). Peran etika dan profesi kependidikan dalam membangun nilai-nilai karakter mahasiswa calon guru. *Holistika: Jurnal Ilmiah PGSD*, 4(1), 27–36. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika/article/view/6553>.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Soliha, I. A. (2024). Ethics and challenges of applying Artificial Intelligence in education. *ICESH Proceedings / ejournal*.
- Tan, X. (2024). Artificial intelligence in teaching and teacher professional development: A systematic review (2015–2024). *ScienceDirect / systematic review*.
- The Guardian. (2025, Dec). The rise of deepfake pornography in schools: 'One girl was so horrified she vomited'. News report highlighting recent cases and policy gaps.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of planning education and research*, 39(1), 93-112.
- (ResearchGate). (2025). Ethical Implications of Using Social Media in An Educational Institution. *ResearchGate*.